

KERENTANAN DAN PENGUATAN KETANGGUHAN EKONOMI PASCA PANDEMI PADA PASAR TENAGA KERJA DI NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM

LOLA FITRIA SARI¹, WILLY NOFRANITA²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP”, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
willynofranita@umsb.ac.id²

Abstrak: Krisis kesehatan pada masa Pandemi COVID-19 seketika diiringi dengan krisis ekonomi secara global di seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara yang masuk dalam keanggotaan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Penelitian literatur ini mencoba menganalisa efek pandemi terhadap negara-negara OKI yang sangat rentan terhadap krisis dan upaya penguatan ketangguhan dalam menghadapi krisis. Merangkum data-data yang diterbitkan oleh *International Labour Organization (ILO)*, *Statistical Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESERIC)*, dan berbagai laporan keuangan yang diterbitkan oleh *European Investment Bank (EIB)* dan *World Bank Enterprise Surveys*. Diharapkan dapat menjadi parameter dan acuan dalam memperkuat ketangguhan dalam menghadapi berbagai guncangan global. Tingkat kerentanan selain tergantung pada letak geografis dalam konteks perubahan iklim. Sudut pandang ekonomi menilai, dampak yang menimbulkan kerentanan melekat pada sistem keuangan, di mana diperlukan kebijakan adaptasi dan mitigasi untuk meminimalkan dampak guncangan dan memperkuat ketahanan sistem ekonomi sehingga dapat dengan mudah kembali ke posisi atau kondisi normal. Turunnya jumlah total lapangan sebanyak 114 juta pada tahun 2020 dan hilangnya 30 juta pekerjaan baru potensial akibat pandemi. Krisis ini telah membawa gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar tenaga kerja, yang semakin memperburuk kondisi kesempatan kerja yang menyebabkan hilangnya 53,6 juta pekerjaan di negara-negara OKI pada tahun 2020. Kondisi ini membutuhkan langkah-langkah kebijakan yang tepat agar melindungi dan mendukung tenaga kerja dalam mempertahankan dan mendapatkan kembali pendapatan mereka selama masa pemulihan. Tulisan ini mencoba merangkum berbagai rekomendasi kebijakan dari berbagai sumber yang disarankan oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia.

Kata Kunci: Kerentanan, Ketangguhan, Pasca Pandemi, Tenaga kerja

A. Pendahuluan

Fenomena pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga mengenai kesiapan menghadapi guncangan global ketika tidak ada kecukupan investasi dan sumber daya yang memadai untuk mengatasinya. Ketidaksiapan akan risiko dan kerapuhan benar-benar memiliki harga yang mahal. Ketika setiap orang memiliki ketangguhan sistem ekonomi maka mereka tidak akan kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Belajar dari krisis ini, pembuat kebijakan harus berupaya dalam memperkuat ketahanan terhadap krisis di masa depan sebagai bagian dari strategi yang terintegrasi secara komprehensif, untuk memperkuat fondasi ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Dalam mempersiapkan kekuatan ekonomi dengan berbagai resiko diperlukan pendekatan secara holistik.

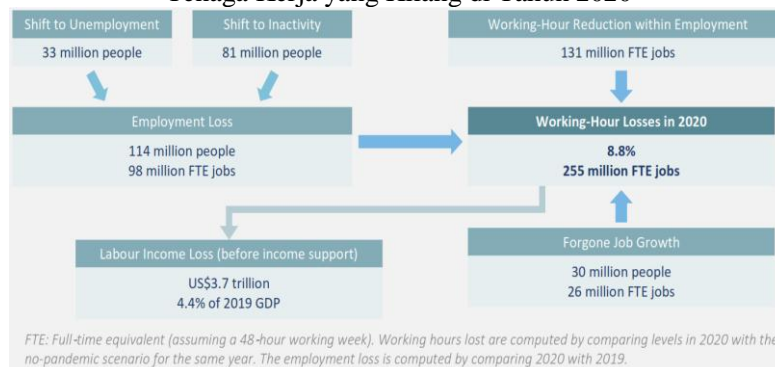
Laporan Keuangan dari *European Investment Bank (EIB)* menjelaskan Indeks Kerentanan Ekonomi (EVI) COVID-19 yang mengkaji berbagai faktor utama yang mempengaruhi ketahanan ekonomi terhadap goncangan COVID-19. Indeks menunjukkan bahwa ekonomi negara berpenghasilan rendah sangat rentan terhadap pandemi COVID-19. Setengah dari negara berpenghasilan rendah dan 25% negara-negara berpenghasilan menengah menghadapi risiko tertinggi COVID-19. Dari 52 negara OKI yang masuk dalam perhitungan indeks, 15 negara OKI sangat rentan, 32 negara menghadapi kerentanan menengah dan hanya lima negara yang menghadapi kerentanan rendah (*European Investment Bank, 2021*). Individu rumah tangga yang rentan mengalami kerugian yang relatif lebih besar selama masa krisis. ketidakesetaraan semakin memperburuk keadaan dan dapat melemahkan orang untuk beradaptasi. Mechler et al., (2011) memandang konsep kerentanan sebagai kemungkinan mengalami stres akibat guncangan eksogen. Tingkat kerentanan tergantung pada letak geografis dalam konteks perubahan iklim, termasuk dampaknya. Dari sudut pandang ekonomi, dampak tersebut akan menimbulkan kerentanan yang melekat pada sistem keuangan, di mana kebijakan adaptasi dan mitigasi kemudian diperlukan untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan sistem ke posisi atau tingkat normal.

Elemen struktural dalam komponen ketahanan dari kerentanan memiliki perbedaan yang dapat diklasifikasikan antara kerentanan struktural, yang dihasilkan dari faktor-faktor yang tidak tergantung pada kemauan politik suatu negara saat ini, dan kerentanan yang berasal dari kebijakan pemerintah dan kepentingan politik. Fitur ini jelas terlihat ketika kerentanan diukur menurut probabilitas krisis keuangan yang dapat diperkirakan terutama dari variabel keuangan dan kebijakan (Berg & Pattillo, 1998). Definisi ini telah dapat diperbaharui dengan menambahkan komponen krisis kesehatan, yang tidak pernah menjadi perhatian sebelumnya. Hal ini merupakan isu baru yang langsung berdampak terhadap guncangan besar terhadap ekonomi saat ini. Ketika krisis kesehatan telah selesai dan pemerintah telah menyatakan fase endemik, pembangunan ekonomi dapat kembali berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi yang lebih tangguh. Prioritas pembangunan ekonomi meliputi peningkatan jaring pengaman sosial agar mengurangi tingkat kesenjangan sosial dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan, mensosialisasikan berbagai peluang ekonomi baru untuk meningkatkan produktifitas, mempromosikan diversifikasi investasi dalam struktur ekonomi agar tidak tergantung pada sektor-sektor tertentu, mendukung transformasi ekonomi digital, dan berinvestasi dalam infrastruktur hijau agar berperan aktif dalam program global mitigasi perubahan iklim.

Pandemi telah memberikan efek yang menghancurkan dunia kerja, mengakibatkan ternyata peningkatan pengangguran, dan hilangnya pendapatan. Mayoritas Pekerja wanita menderita kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang tidak proporsional, dikarenakan peran pekerja wanita mereka yang lebih besar dalam sektor yang paling terdampak krisis kesehatan. Krisis ini sangat mengganggu sektor pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan kaum muda, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Perkembangan pasar setelah pandemi COVID-19 dengan referensi khusus ke negara-negara OKI memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk pemulihan yang ekonomi yang tangguh. Pandemi yang diiringi dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan penutupan tempat kerja dan sektor-sektor publik lainnya merupakan langkah yang diterapkan untuk mengekang penyebaran virus, telah mengakibatkan perlambatan dalam kegiatan ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia, dan mendatangkan guncangan di pasar tenaga kerja. Perkiraan terbaru dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 2021) menunjukkan bahwa, pada kuartal keempat 2019, total jam kerja hilang sebesar 8,8% pada tahun 2020, setara dengan jam kerja dalam waktu satu tahun oleh 255 juta pekerja penuh waktu. Separuh dari hilangnya jam kerja disebabkan oleh hilangnya pekerjaan, setengahnya lagi disebabkan oleh adanya pengurangan jam kerja.

Menurut ILO, (2021) diperkirakan pekerja yang menganggur sekitar 33 juta atau yang keluar dari angkatan kerja sebanyak 81 juta sehingga total lapangan kerja turun 114 juta pada tahun 2020. Ditambah lagi dengan hilangnya 30 juta pekerjaan baru potensial yang dapat diciptakan jika tidak ada pandemi, ini berarti bahwa terjadi kekurangan lapangan kerja global meningkat sebesar 144 juta orang pada tahun 2020, setara dengan 124 juta pekerja waktu penuh (full-time equivalent/FTE). Sisanya, 131 juta pekerjaan FTE, disebabkan oleh pengurangan jam kerja di antara pekerja karena jam kerja yang lebih pendek dari sebelumnya.

Gambar 1: Estimasi Jam Kerja, Pekerjaan dan Pendapatan
Tenaga Kerja yang Hilang di Tahun 2020

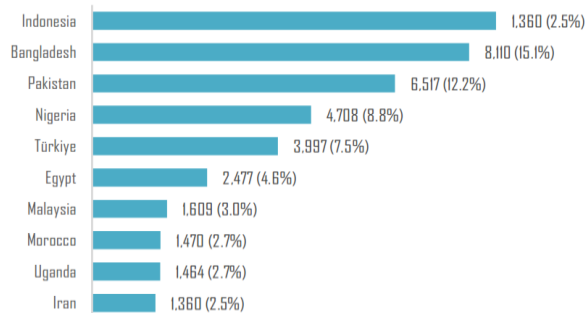


Sumber: Source: ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition 2021

Pandemi telah membawa gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar tenaga kerja. Tantangan ini telah memperburuk kondisi kesempatan kerja yang menyebabkan hilangnya 53,6 juta pekerjaan FTE di negara-negara OKI pada tahun 2020, atau seperlima dari kerugian

global. Tiga perempat dari kerugian global ini terjadi di sepuluh negara OKI berpenduduk padat, yaitu Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Türkiye, Mesir, Malaysia, Maroko, Uganda, dan Iran.

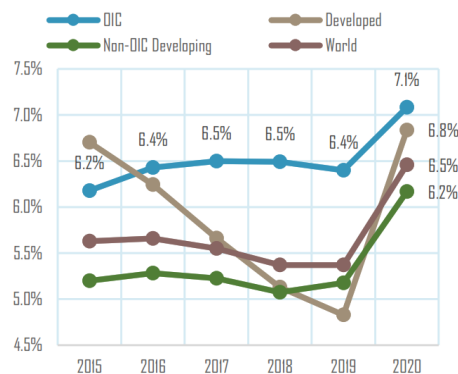
Gambar 2: Jumlah Pekerjaan yang Hilang Akibat Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 (FTE, ribuan)



Source: ILOSTAT, ILO Modelled Estimates.

Ketika pandemi sebagai krisis kesehatan telah menyebabkan krisis ekonomi, terjadi lonjakan pengangguran disepanjang tahun 2020, jutaan orang di seluruh negara OKI dipaksa menganggur. Menurut data dari ILO pada tahun 2020 di negara-negara OKI jumlah pengangguran meningkat lebih dari 4 juta hingga mencapai 49,3 juta. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,1% pada tahun itu, naik 0,7 poin dari persentase 6,4% pada 2019. Angka ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan di negara maju dan negara berkembang non-OKI.

Gambar 3 Tingkat Pengangguran



Sumber: Perhitungan staf SESRIC berdasarkan ILOSTAT, Estimasi Model ILO, 2020

B. Metodologi Penelitian

Konsep kerentanan merupakan alat analisis yang kuat untuk mendeskripsikan keadaan kerawanan terhadap bahaya, ketidakberdayaan, dan kelemahan sistem fisik dan sosial, untuk memandu tindakan analisis normatif dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengurangan risiko. Kerentanan, biasanya digambarkan dalam istilah negatif sebagai kerawanan untuk dirugikan. Hal ini sering dikutip yang menjadi ide definisi dari IPCC (McCarthy et al., 2002). Fokus Manajemen risiko menghadapi bencana dan beradaptasi terhadap perubahan iklim bagaimana mengurangi paparan dan kerentanan terhadap berbagai kondisi buruk, serta peningkatan ketahanan terhadap dampak buruk dari potensi iklim yang ekstrem (IIPC, 2012) Dalam konteks ini, perlindungan dan kemaanan sosial harus dilihat sebagai parameter akhir. Kerentanan ekonomi negara berkembang sebenarnya bukan masalah baru. Jika kita meninjau literatur pembangunan empat puluh tahun yang lalu, masalah ketidakstabilan, terutama untuk ekspor primer dan harga internasional, menjadi bagian penting dalam analisis masalah yang dihadapi negara-negara berkembang. Belakangan ini kerentanan ekonomi negara-negara berkembang kembali muncul menjadi agenda internasional yang tinggi, bahkan semakin tinggi dengan terjadinya gejolak ekonomi dunia akibat dari gejolak kesehatan. Kerentanan ekonomi suatu negara merupakan risiko suatu negara "miskin" yang menyebabkan terhambatnya perkembangannya akibat dari guncangan alam atau eksternal lainnya yang sedang dihadapi. Dua jenis utama guncangan eksogen, dua sumber yang merupakan kerentanan utama: (I) guncangan lingkungan atau 'alam', yaitu bencana alam seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi, dan guncangan iklim yang lebih

sering seperti angin topan dan angin topan, kekeringan, banjir, dll., dan (ii) guncangan eksternal (terkait perdagangan dan pertukaran), seperti penurunan permintaan eksternal, ketidakstabilan harga komoditas dunia (dan ketidakstabilan terkait dalam hal perdagangan), fluktuasi suku bunga internasional, dll. Guncangan domestik lainnya juga dapat ditimbulkan oleh ketidakstabilan politik atau, lebih umum, oleh perubahan politik yang tidak terduga (Guillaumont, 2009). Kerentanan ekonomi struktural harus dapat dibedakan dengan jelas dari kerapuhan negara. Negara-negara yang rapuh didefinisikan menurut indikator kebijakan, pada dasarnya merupakan penilaian kebijakan negara dan institusional Bank Dunia "*Country Policy and Institutional Assessment*" (CPIA). Negara rapuh adalah (berkembang, tetapi kadang-kadang berpenghasilan rendah) negara yang memiliki skor kebijakan (sangat) rendah. Kerentanan dapat dianggap sebagai hasil dari tiga komponen: i) ukuran dan frekuensi guncangan eksogen, baik yang diamati (kerentanan *ex post*) atau yang diantisipasi (kerentanan *ex ante*), ii) paparan guncangan, iii) kapasitas untuk bereaksi terhadap guncangan, atau ketahanan. Diketahui, ketahanan sangat bergantung pada kebijakan, dibandingkan pada struktural (Guillaumont, 2009). Beberapa studi empiris menyatakan uji kerentanan makro yang mempertimbangkan ketidakstabilan pertumbuhan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ramey & Ramey, 1998) menunjukkan hubungan yang signifikan antara ketidakstabilan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam menguji eksogenitas ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini juga disebabkan oleh faktor struktural maupun kebijakan, oleh karena itu volatilitas pertumbuhan tidak dapat menjadi indikator perkiraan kerentanan struktural. Hal yang sama juga ditemukan terhadap nilai hubungan antara volatilitas output dan pertumbuhan (Hnatkovska & Loayza, 2003). Masalah kerentanan dihadapkan juga pada konsekuensi ukuran negara. Ukuran suatu negara memiliki banyak konsekuensi terkait dengan kerentanan, misalnya, skala ekonomi di banyak sektor kegiatan industri maupun pemerintah. Ukuran negara penting untuk pengembangan sebuah negara, ketika ukuran negara kecil maka kerentanan dapat menjadi lebih besar. Dalam hal ini hubungan ukuran negara dengan kerentanan jelas terlihat. Setidaknya ada tiga variabel perantara yang menunjukkan ukuran negara yang kecil mempengaruhi komponen kerentanan: (i) intensitas perdagangan, (ii) ukuran pemerintah, dan (iii) kohesi sosial (Guillaumont, 2009). Indeks kerentanan ekonomi "*The Economic Vulnerability Index*" (EVI) Indeks kerentanan adalah indeks gabungan yang dirancang oleh CDP "*Committee for Development Planning*" (of the United Nations) dan diterapkan pertama kali pada tahun 2000 untuk mengidentifikasi kriteria negara-negara kurang berkembang. EVI memiliki empat elemen: indeks guncangan yang terdiri dari indeks guncangan perdagangan, indeks guncangan alami, dan indeks eksposur yang terdiri dari indeks untuk ukuran (rendah) seperti 'lokasi dan struktur'. Beberapa metode rata-rata dapat digunakan untuk menggabungkan guncangan dan indeks eksposur. Dalam rata-rata aritmatika dari empat elemen, setiap indeks diambil secara independen dari yang lain. Jika kita ingin memperhitungkan fakta bahwa kerentanan struktural adalah hasil dari interaksi guncangan dan keterpaparan, kita mungkin perlu mempertimbangkan metode rata-rata lainnya. EVI terkait dengan faktor struktural bukan faktor kebijakan yang berada di luar kendali negara yang memengaruhi kerentanan global terutama menyangkut ketahanan. EVI telah dirancang untuk mengidentifikasi negara-negara di antara negara-negara berpenghasilan rendah yang paling dirugikan oleh hambatan struktural terhadap pertumbuhan. Perlu disebutkan bahwa EVI diukur untuk kumpulan negara yang lebih besar tidak hanya untuk kelompok tertentu, sehingga tidak hanya mencakup negara berpenghasilan rendah tetapi juga negara berpenghasilan menengah. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa EVI juga dapat diterapkan untuk tujuan lain di mana pengukuran cacat struktural ini akan tampak berguna. Kami berpendapat bahwa ini terlihat jelas dalam mencari alokasi bantuan yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Pandemi Memperburuk Kerentanan Yang Ada Dan Berubah Menjadi Krisis Global Multidimensi. Ketika pemerintah mulai mengumumkan kasus COVID-19 dinegara mereka, sebagian besar fokus pemerintah adalah pada pencegahan penyebaran virus dan membantasi interaksi sosial masyarakat baik di dalam maupun ke luar negeri. Kondisi darurat kesehatan seketika berubah menjadi krisis ekonomi dan sosial, dampak negatif yang signifikan terjadi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial yang membutuhkan interaksi antar manusia seperti sektor pariwisata, perjalanan, dan perhotelan, jutaan orang menghadapi tantangan kehilangan pekerjaan dan pendapatan, kondisi ketidaksiapan dalam menghadapi keadaan darurat yang memadai, kapasitas, dan sumber daya yang terbatas menjerumuskan jutaan orang kembali ke

dalam garis kemiskinan. Ancaman kebangkrutan pada sejumlah besar perusahaan, sebagian besar usaha kecil dan menengah (UKM). Upah yang stagnan dan hilangnya pendapatan bagi pekerja membatasi tingkat konsumsi dan akses ke layanan primer. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tetap putus asa dalam menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga mereka. Langkah-langkah perlindungan sosial diperluas tetapi tetap tidak mencukupi atau tidak dapat diakses oleh banyak orang. Negara-negara dengan keterbatasan ruang fiskal mulai menghadapi krisis dan kesulitan membayar utang negara.

Potensi konvergensi dan pembelajaran mengenai kerentanan dan ketahanan berasal dari fokus yang konsisten pada sistem sosial-ekologis. Konsep sistem sosial-ekologis mencerminkan gagasan bahwa tindakan manusia dan struktur sosial merupakan bagian yang terintegrasi dari alam, karenanya setiap perbedaan antara sistem sosial dan alam bersifat arbitrer. Tergambar bahwa sistem alam mengacu pada proses biologis dan biofisik sementara sistem sosial terdiri dari aturan dan lembaga yang menengahi penggunaan sumber daya manusia serta sistem pengetahuan dan etika yang menafsirkan sistem alam dari perspektif manusia. Ketahanan menjadi berpengaruh dalam sektor pembangunan dalam mengurangi kerentanan seperti perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim (Béné et al., 2012). Ketahanan memiliki keterbatasan. Secara khusus, memiliki tujuan pengentasan kemiskinan tidak bisa begitu saja diganti dengan pembangunan ketahanan.

Melindungi Pekerja yang Rentan Selama Pandemi. Lebih dari 50% pekerja di negara-negara OKI diklasifikasikan sebagai rentan pada 2019. Kawasan Afrika sub-Sahara memiliki pangsa pekerjaan rentan tertinggi, mencapai hingga 93,7% di Niger, 93% di Chad, dan 89,4% di Guinea. Banyak dari mereka telah menderita kerugian ekonomi yang parah tanpa atau akses terbatas ke langkah-langkah perlindungan sosial, sehingga berpotensi menimbulkan efek negatif jangka panjang pada rumah tangga dan mata pencaharian mereka. Sekitar 2 miliar pekerja (61,2% dari angkatan kerja dunia) bekerja di pekerjaan informal, sebagian besar di negara berkembang dan berkembang. Menurut perkiraan (ILO, 2021), hampir 1,6 miliar pekerja di ekonomi informal di semua wilayah dunia telah terpengaruh oleh tindakan penguncian dan penahanan.

Dampak buruk dari krisis terhadap pekerja di sektor informal membutuhkan langkah-langkah kebijakan yang tepat agar melindungi dan mendukung mereka dalam mempertahankan dan mendapatkan kembali pendapatan mereka selama masa pemulihan. Banyak pemerintah mengambil tindakan untuk mendukung kelompok rentan dengan memberikan berbagai bentuk manfaat tunai dan jaminan pendapatan. Jika tidak memungkinkan untuk memberikan dukungan pendapatan melalui skema atau program yang ada, mekanisme lain harus dijajaki untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi pekerja rentan dan keluarganya. Seperti halnya di Indonesia yang berupaya untuk melengkapi pendapatan dengan memberikan dukungan pangan untuk mencegah kelaparan di antara masyarakat yang paling terkena dampak krisis.

Pemerintah harus segera merancang kriteria kelayakan yang tepat dan memastikan bahwa dapat memberikan manfaat secara efektif dan merata. Peningkatan insentif dan kesetaraan, sangat penting untuk menentukan kriteria kelayakan berdasarkan karakteristik jenis pekerjaan, sektor pekerjaan, atau ukuran perusahaan serta menghindari hubungan khusus manfaat dengan status informalitas yang dapat mempengaruhi objektifitas. Strategi inklusif yang menargetkan kategori luas pekerja berpenghasilan rendah dapat menghindari penciptaan insentif bagi pekerja untuk tetap tinggal atau menjadi pekerja informal dan dapat memberikan dasar untuk memfasilitasi transisi mereka ke ekonomi formal.

Sifat pandemi COVID-19 menuntut implementasi kebijakan yang cepat dan efektif dalam skala yang cukup besar untuk menjangkau jutaan individu dan bisnis yang terdampak. Kebijakan inovatif yang memungkinkan dukungan pendapatan yang efektif untuk disalurkan ke kelompok sasaran melalui mekanisme identifikasi dan pengiriman yang cepat dan aman sangat penting untuk perluasan cakupan yang cepat kepada pekerja yang sebelumnya tidak bekerja. Negara dengan perekonomian informal yang besar yang tidak memiliki kapasitas kelembagaan dan keuangan untuk mencakup semua pekerja perekonomian informal menerapkan pendekatan sektoral yang berfokus pada pekerja yang pekerjaan yang sangat terpengaruh oleh adanya krisis. Langkah-langkah perlindungan sosial perlu dikoordinasikan bersama dengan langkah-langkah kebijakan lainnya juga agar secara efektif dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial dan ekonomi dari krisis terhadap pekerja di perekonomian informal. Termasuk memberikan dukungan kepada usaha mikro dan kecil dan pekerja mandiri dalam bentuk hibah; pinjaman bersubsidi; masa tenggang atas

pinjaman yang beredar, atau penangguhan atau pengurangan pinjaman, sewa atau tagihan utilitas, seperti yang diamati di Senegal.

Bagaimana Mengurangi Kerentanan dan Memperkuat Ketahanan. Belajar dari krisis yang terjadi akibat pandemi ini, pembuat kebijakan harus semakin berupaya memperkuat ketahanan terhadap krisis di masa depan sebagai bagian strategi yang terintegrasi secara komprehensif. Memperkuat fondasi ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Mempersiapkan ketangguhan ekonomi dan masyarakat untuk beragam risiko yang tidak terduga. Mempertimbangkan dampak signifikan dari pandemi serta kerentanan dan kesenjangan yang berlebihan dalam sistem dasar, strategi pembangunan ketahanan yang komprehensif harus menjadi inti dalam membuat kebijakan pasca-COVID-19.

Penting untuk disadari bahwa pemulihan ekonomi harus memiliki tujuan yang lebih luas tidak hanya memulihkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan struktur ekonomi yang terdiversifikasi dengan baik dan ramah lingkungan serta meningkatkan standar hidup dengan investasi yang memadai dalam kapasitas manusia dan kelembagaan. Berinvestasi dalam peningkatan keterampilan untuk potensi ekonomi baru akan sangat penting dalam masa pemulihan dan transformasi ekonomi global yang merata (World Economic Forum, 2021). Melindungi kesejahteraan generasi saat ini seharusnya tidak membebani generasi mendatang dengan tingkat hutang yang tidak berkelanjutan, hutang yang menumpuk, dan krisis fiskal yang berulang (Sesric, Statistical, 2022).

Skema perlindungan sosial perlu disiapkan oleh pemerintah dengan mendukung pemberi kerja. Seperti, pemerintah Qatar yang mengumumkan skema pinjaman QAR sebesar 3 miliar untuk membayar gaji pekerja dan sewa majikan. Indonesia mengalokasikan anggaran untuk memberikan subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja (Sesric, Statistical, 2022). Oman menangguhkan atau menunda pembayaran iuran asuransi sosial untuk karyawan untuk sementara waktu. Namun, juga mengharuskan karyawan untuk membayar cuti kepada pekerja di sektor swasta, termasuk dalam masa karantina mandiri.

Rekomendasi Kebijakan dalam memperbaiki Ketahanan. Pandemi semakin menambah tantangan di pasar tenaga kerja yang sudah ada sebelumnya, termasuk menekan peningkatan jumlah pengangguran, defisit peluang pekerjaan yang layak, kemiskinan para pekerja, kurangnya keterampilan, dan rendahnya produktivitas, rumusan kebijakan diperlukan untuk mengatasi tantangan dan mencapai ketahanan yang lebih besar di pasar tenaga kerja dalam jangka panjang. Rekomendasi berikut dibuat dalam arah ini.

Meningkatkan kesiapan tanggap darurat: Untuk meminimalkan dampak krisis di pasar tenaga kerja, harus dikembangkan kapasitas kelembagaan yang kuat dengan perangkat kebijakan yang beragam dan mekanisme implementasi alternatif juga dikembangkan untuk mengantisipasi situasi krisis. Memberikan insentif kepada para pengusaha yang terdampak krisis juga diperlukan, untuk mempertahankan pekerja meskipun ada pengurangan aktivitas operasional bisnis dimasa krisis, berbagai macam bentuk insentif yang dapat diberikan seperti melalui penganggran subsidi upah dan tindakan sementara yang berkaitan dengan keringanan pajak dan kontribusi jaminan sosial untuk mempertahankan pekerjaan dan pendapatan. Keberlanjutan layanan dan kebijakan ketenagakerjaan nasional harus diperkuat untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik bagi pekerja dan pengusaha dalam mengurangi hambatan ekonomi dan pasar tenaga kerja akibat krisis. Bentuk pemodalannya yang inovatif harus didorong dan didukung untuk mempertahankan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja yang memadai.

Menstimulasi penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja: Memastikan kelangsungan bisnis merupakan tantangan utama selama krisis, karena banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) berjuang untuk bertahan dari guncangan permintaan dan penawaran. Merancang dan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter secara tepat dapat meningkatkan pertumbuhan yang kuat dan penciptaan lapangan kerja dalam jangka menengah dan panjang. Memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang dapat menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja. Investasi dalam modal manusia harus disertai dengan investasi publik dan swasta yang kuat dalam modal fisik, dan penerapan kebijakan moneter dan nilai tukar yang kondusif untuk pertumbuhan (Mwamadzingo et al., 2021). Peningkatan infrastruktur dan rantai nilai sektoral, dapat memberikan peluang bagi perusahaan dan menciptakan lapangan kerja baru, dengan implikasi lebih lanjut pada pengembangan keterampilan dan pertumbuhan produktivitas.

Mengembangkan kebijakan dan lembaga pasar tenaga kerja aktif yang efektif: Untuk membantu transisi tenaga kerja dari tidak memiliki aktifitas menjadi bekerja atau untuk mengakses

pekerjaan yang lebih baik, diperlukan kebijakan pasar tenaga kerja aktif “*Active labour market policies*” (ALMPs). ALMPs mencakup berbagai intervensi yang dapat menargetkan penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. ALMPs membantu meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kesetaraan, meningkatkan mobilitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan, serta mengurangi kemiskinan. ALPMs memiliki target pada kelompok-kelompok tertentu untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dari kelompok-kelompok ini, termasuk pemuda, perempuan, orang cacat, pengangguran jangka panjang, dan imigran. Program pelatihan, sebagai program kerja ALMP klasik yang paling sering digunakan di seluruh dunia, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan keterampilan. Akhirnya, untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan pasar tenaga kerja dengan sukses, perlu dibentuk lembaga yang efektif, yang dapat memfasilitasi interaksi antara berbagai aktor ekonomi, termasuk layanan ketenagakerjaan publik dan swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pusat pendidikan dan pelatihan serta sebagai perwakilan sektor swasta.

Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok yang rentan: Pekerja yang rentan sangat terpuak oleh krisis ekonomi. Kebijakan yang efektif diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan, memformalkan ekonomi informal, mengatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak aman dan mempromosikan lingkungan yang mendukung bagi kewirausahaan dan perusahaan yang berkelanjutan. Kebijakan harus dirancang untuk mempromosikan akses pekerjaan kepada kelompok yang rentan melalui program pekerjaan dan pelatihan. Peluang pengembangan keterampilan untuk kelompok-kelompok tersebut harus dipromosikan agar mereka dapat menanggapi kebutuhan pasar tenaga kerja. Semakin pentingnya digitalisasi dan kemajuan teknologi harus tercermin dalam perumusan kebijakan terhadap kelompok rentan dengan mengurangi kesenjangan digital dan menciptakan lapangan kerja yang layak

Kembangkan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas: Pandemi menyebabkan banyak orang mungkin menghadapi pengangguran berkepanjangan, mengikis keterampilan dan produktivitas mereka di masa depan, dan pendatang baru mungkin menghadapi pendapatan jangka panjang yang lebih rendah karena pandemi (International Monetary Fund, 2021). Ketahanan ekonomi dapat dicapai dengan menerapkan perpaduan yang tepat antara kebijakan makroekonomi dan pasar tenaga kerja. Strategi pengembangan keterampilan harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan ekonomi untuk menghindari ketidaksesuaian keterampilan, pemanfaatan tenaga kerja yang kurang, dan produktivitas yang rendah.

D. Penutup

Kebijakan harus dikembangkan untuk mendukung pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak bagi kalangan muda, untuk memaksimalkan potensi mereka sebagai sumber dinamisme, bakat, kreativitas, dan inovasi di dunia kerja dan sebagai kekuatan pendorong untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Akses pelatihan, bimbingan karir, dan tenaga kerja yang merata, dapat memfasilitasi transisi pasar tenaga kerja yang berhasil mengurangi ketidaksesuaian keterampilan. Kebijakan diversifikasi ekonomi, langkah-langkah untuk memfasilitasi formalisasi dan pengembangan sektor swasta, dan penegakan standar ketenagakerjaan semuanya dapat berkontribusi pada pembangunan dan promosi pekerjaan yang layak (PBB, 2021c). Transformasi produktif dapat dicapai dengan lingkungan yang mendukung bagi perusahaan dan kebijakan ekonomi makro yang mendukung. Lembaga pasar tenaga kerja yang efektif adalah elemen penting dari pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak dan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Akhirnya, disarankan untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara OKI di bidang pasar tenaga kerja. Beberapa mekanisme yang pernah ada membutuhkan partisipasi aktif dari Negara-negara Anggota, seperti Strategi Pasar Tenaga Kerja OKI 2025. Mekanisme tersebut memungkinkan Negara Anggota untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi tantangan kritis yang dihadapi oleh mayoritas negara OKI.

Daftar Pustaka

- Béné, C., Wood, R. G., Newsham, A., & Davies, M. (2012). Resilience: New Utopia or New Tyranny? Reflection about the Potentials and Limits of the Concept of Resilience in Relation to Vulnerability Reduction Programmes. In *IDS Working Papers* (Vol. 2012, Issue 405). <https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2012.00405.x>
- Berg, A., & Pattillo, C. (1998). Are Currency Crises Predictable? A Test. In *IMF Working Paper. Working Paper of the International Monetary Fund.*

- <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp98154.pdf>
- European Investment Bank. (2021). Financial Report. In *Financial Report 2020* (2021st ed., Vol. 8, Issue 2). European Investment Bank Group. <https://doi.org/10.1080/15575330.1977.10878141>
- Guillaumont, P. (2009). An economic vulnerability index: Its design and use for international development policy. *Oxford Development Studies*, 37(3), 193–228. <https://doi.org/10.1080/13600810903089901>
- Hnatkovska, V., & Loayza, N. (2003). VOLATILITY AND GROWTH. *World Bank Document*.
- IIPC, Change, I. P. on C., & Extreme. (2012). MANAGING THE RISKS OF EXTREME EVENTS AND DISASTERS TO ADVANCE CLIMATE CHANGE ADAPTATION. In Christopher B. Field (Ed.), *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Vol. 9781107025). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139177245.009>
- ILO. (2021). *Statistical youth update_260521_fin. June*, 1–14. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>
- International Monetary Fund. (2021). World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic. In *World Economic Outlook* (Issue May). <https://iiep.gwu.edu/2021/10/26/imf-world-economic-outlook-recovery-during-a-pandemic-health-concerns-supply-disruptions-and-price-pressure/>
- McCarthy, J. J., Canziani, O. F., Leary, N. A., Dokken, D. J., & White, K. S. (2002). Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability. In *Intergovernmental Panel on Climate Change* (Vol. 39, Issue 06). <https://doi.org/10.5860/choice.39-3433>
- Mechler, R., Linnerooth-Bayer, J., & Hochrainer-Stigler, S. (2011). Insurance against Losses from Natural Disasters in Developing Countries. *Journal of Integrated Disaster Risk Management*, 1(1), 59–81. <https://doi.org/10.5595/idrim.2011.0013>
- Mwamadzingo, M., Akuupa, M. U., & Kazembe, L. N. (2021). Macroeconomic policies for job-led growth and recovery following the COVID-19 pandemic, with emphasis on sub-Saharan Africa. *International Journal of Labour Research*, 10(1/2), 65–80. <http://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/hanapi/hanapi.php?profile=4dfs1q6ik%2BHI6trd2JLhy6XO1eGS3NLldzU0trT4ZLZ19eIxNzcp6jHspXmyNipz6WP&DestinationURL=https%3A%2F%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26db%3Dsih%26AN%3D153400179%26site>
- Ramey, G., & Ramey, V. A. (1998). Cross-country evidence on the link between inflation volatility and growth. *Applied Economics*, 30(10), 1317–1326. <https://doi.org/10.1080/000368498324931>
- Sesric, Statistical, E. and S. R. and T. C. for I. C. (2022). *Socio-Economic Impact of The Covid-19 Pandemic in OIC Countries*. Publication Department, SESRIC. <https://sesricdiag.blob.core.windows.net/>
- World Economic Forum. (2021). *Building Back Broader: Policy Pathways for an Economic Transformation. June*, 77. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_NES_Policy_Pathways_for_an_Economic_Transformation_2021.pdf